

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat populasi yang besar pertahunnya. Jumlah penduduk di Indonesia saat ini menempati posisi keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa.¹. Dengan besarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia saat ini tentunya memiliki permasalahan yang besar pula, mulai dari angka kemiskinan hingga pengangguran. salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran.

Masalah pengangguran menjadi momok yang menakutkan bagi negara-negara berkembang khususnya seperti Negara Indonesia. Negara berkembang sering kali dihadapkan dengan tingginya angkatan kerja yang terus bertambah dan arus migrasi yang terus mengalir, sempitnya lapangan pekerjaan, kurangnya modal yang dimiliki, serta kelangkaan investasi membuat bangsa ini sulit maju dan berkembang.

Tingginya angka Pengangguran memiliki dampak tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Secara ekonomi, tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu penyebab hilangnya potensi dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Berbicara masalah

¹ Hermes sahero Butar Butar, "Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Pekanbaru", *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015, Hal. 3

pengangguran tidak hanya menjadi masalah bagi pemerintah pusat tetapi juga bagi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sumber daya manusia memiliki peran vital sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan hal itu pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan dan partisipasinya untuk pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".²

Hal ini berarti semua warga Indonesia berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan skil dan kemampuannya sehingga diharapkan mampu memperoleh penghasilan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Begitu krusialnya masalah ketenaga kerjaan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dan menyeluruh dari berbagai lapisan dan berbagai pihak. Sebab masalah ketenaga kerjaan pada dasarnya memiliki sifat yang multidimensi yang saling mempengaruhi dan di pengaruhi oleh berbagai faktor dan pola hubungan. Sehingga penyelesaiannya harus dengan pendekatan yang multidimensi pula.

Adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 4 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.³

Pemerintah berkewajiban dalam mengatasi masalah pengangguran seperti pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁴ Dapat dilihat dalam pasal 1 menyatakan:

- 1) Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang di jadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
- 2) Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3) Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat

³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 4

⁴ Hermes Saroha Buntar-buntar, "Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Kota Pekanbaru" *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 2 No. 2-Oktober 2015, hal. 2

dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu Terdapat juga pada pasal 39 tentang pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah disetiap sektor daerah untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik diluar maupun didalam hubungan kerja.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan. Angkatan kerja adalah pelaku dalam proses pembangunan. Demi berhasilnya suatu pembangunan di perlukan angkatan kerja yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Penciptaan kesempatan kerja adalah tujuan yang akan di capai dalam pembangunan, terutama dalam kondisi Indonesia yang mengalami surplus tenaga kerja. Masalah penciptaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu tantangan bagi strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia yang di lakukan selama ini belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga kerja yang terus meningkat, orientasi pembangunan Indonesia selama ini masih lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal(capital intensif) sehingga belum banyak meyerap angkatan kerja yang ada. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan

pekerjaan dengan ketersediaan kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.⁵

Masalah pengangguran di Indonesia saat ini tentunya bukan hanya pada tataran pusat saja akan tetapi daerah juga mengalami masalah yang krusial terhadap pengelolaan dan penanganan angka pengangguran di daerah. Seperti halnya yang dialami pemerintah Kabupaten Blitar bahwa angka pengangguran merupakan masalah yang harus cepat ditanggulangi demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Daerah yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Blitar. Berdasarkan Data yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, pada tahun pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Blitar tercatat sebesar 1.157.500 jiwa. Sementara itu pertumbuhan penduduk tahun 2018 dibandingkan penduduk pada tahun 2017 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 0.32%. Pertumbuhan ini mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2017 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0.36%.

Otomatis jumlah penduduk di Kabupaten Blitar akan meningkatkan jumlah pengangguran yang berdomosili di Kabupaten Blitar, karena jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar dari hasil survey tahun 2018 adalah 21.508 penduduk. Data jumlah komposisi penduduk kabupaten blitar tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

⁵ Hermes Saroha Buntar-buntar, "Strategi Dinas Tenaga Kerja ...3

Tabel I.1
Jumlah Komposisi Penduduk
Kabupaten Blitar Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.140.793	1.145.396	1.149.710	1.153.803	1.157.500
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.36	0.40	0.38	0.36	0.32
3	Jumlah Tenaga Kerja	606.076	597.639	-	638.135	638.460
4	Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja	587.403	580.982	-	619.050	616.952
5	Jumlah pengangguran	18.673	16.657	-	19.085	21.508

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, tahun 2019⁶

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Blitar setiap tahun mengalami peningkatan, serta di barengi dengan peningkatan jumlah pengangguran sejak tahun 2015 sampai tahun 2018. Jika kita amati kenaikan jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Blitar pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di banding dengan jumlah pengangguran pada tahun 2016. Hal ini menandakan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar kurang maksimal.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan penting dalam menangani

⁶ Disnaker Kabupaten Blitar

masalah pengangguran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Blitar yang memuat salah satu tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar adalah Melakukan Pembinaan, Penempatan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. Maka, penanganan masalah ketenagakerjaan terutama pengangguran, hanya dapat berhasil apabila berpegang pada perencanaan strategis angkatan kerja yang tepat, yang diimbangkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.

Dengan adanya perencanaan strategis oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar kepada angkatan kerja di Kabupaten Blitar yang tepat guna dan berdaya guna, sehingga dapat memperkirakan kebutuhan angkatan kerja Kabupaten Blitar, pada sektor tertentu, pada waktu tertentu untuk keahlian tertentu dan atau juga sebaliknya. Upaya pengangguran dan setengah pengangguran ditujukan untuk merubah status penduduk dari beban pembangunan menjadi tenaga kerja produktif dan renumeratif sebagai aset bangsa yang potensial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dan mengambil judul “Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dalam Mengurangi Penganggurann Di Kabupaten Blitar”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar Dalam peneitian kualitatif ini peneliti mengetahui strategi yang diterapkan dinas tenaga kerja Kabupaten Blitar dalam mengurangi

pengangguran, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi strategi tersebut dalam mengurangi pengangguran di kabupaten blitar pada periode 2014-2018. Pengangguran yang dimaksud disini adalah pencari kerja yang mendaftar pada dinas tenaga kerja Kabupaten Blitar.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi di Kabupaten Blitar?
2. Apa saja faktor yang pendukung dan penghambat strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Blitar ?
3. Apa saja solusi dalam yang ditawarkan dinas tenaga kerja Kabupaten blitar melihat faktor penghambat tersebut?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan dinas tenaga kerja Kabupaten blitar melihat faktor penghambat tersebut

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai ilmu manajemen strategi dan ekonomi makro.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Dinas Tenaga Kerja

Penelitian ini bisa di jadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu Lembaga Dinas terutama dalam hal meningkatkan pelayanan terutama untuk mengurangi tingkat pengangguran.

b. Bagi Akademik

Sebagai perbendaharaan bagi perpustakaan IAIN Tulunggung, sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

F. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini, peneliti perlu memberikan penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan atau perbedaan pemahaman dalam membaca proposal skripsi ini, yaitu:

1. Definisi Koseptual

a. Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. dengan ciri utama adalah *Goal-directed actions* yaitu aktivitas yang menunjukkan “apa” yang diinginkan organisasi dan “bagaimana”, mempertimbangkan semua kekuatan internal (*sumber daya dan kapabilitas*), serta memperhatikan peluang dan tantangan.⁷

b. Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari Ilmu Manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi.⁸

c. Dinas Tenaga Kerja

Dinas Renaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 19 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar. Kedudukan Dinas Tenaga adalah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada

⁷ Hermes Saroha Butar-Butar,Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Pekanbaru” *Jurnal Ilmu Administrasi.JOM FISIP, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015*

⁸ Kresensius Wio, “Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja di Kecamatan Kobeng Kabupaten Kutai Timur”, *Jurnal Administrasi Negara, Vol. 4, No. 2, 2016.*

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menurut peraturan Bupati Blitar Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.⁹

- d. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.¹⁰

2. Definisi Operasional

Strategi yang dimaksud disini adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang meliputi apa dan bagaimana. Oleh karena itu dalam menentukan strategi penting dilakukan analisis untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan serta peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi perusahaan. Strategi berguna untuk menentukan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi guna menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub atau bagian dan sebelum memakai bab pertama, lebih dahulu penulis sajikan beberapa bagian awal yang meliputi: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar

⁹ Peraturan Daerah No 19 Tahun 2008

¹⁰ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm. 11

gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Kemudian bagian isi yang terdiri dari:

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Kajian Pustaka, terdiri dari: deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konsep.
- BAB III** Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian.
- BAB IV** Hasil penelitian, terdiri dari: deskripsi data, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian.
- BAB V** Pembahasan yang berisi tentang analisis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.
- BAB VI** Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran.